

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN

Fauziah Husain¹, Adrian Lakoro², Nurlaila R. Asuki³, Ismail Saputra⁴
fauziah@iaingorontalo.ac.id¹, adrianlakoro508@gmail.com², nurlailaasuki@gmail.com³,
ismailsaputra180504@gmail.com⁴
IAIN Sultan Amai Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi partisipasi masyarakat, seperti kurangnya kesadaran dan edukasi dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Ekonomi Nasional, Kesejahteraan, Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to determine the importance of community participation in national economic development to achieve welfare. This study uses a library research method by analyzing various literatures related to economic development and community participation. The results show that community participation is very important in national economic development because it can improve the quality and effectiveness of development. However, there are still many challenges faced in implementing community participation, such as lack of awareness and education from the government. Therefore, efforts need to be made to increase community awareness and education about the importance of participation in development, as well as increasing community involvement in the development process. This study is expected to contribute to the development of more effective and sustainable economic development policies.

Keywords: Community Participation, National Economic Development, Welfare, Sustainable Development, Economic Development Policies.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi nasional merupakan strategi utama yang dijalankan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan.

Sayangnya, proses pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa minimnya keterlibatan masyarakat. Kurangnya partisipasi ini menimbulkan berbagai hambatan dalam implementasi pembangunan yang efektif. Padahal, masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga dalam merancang pembangunan yang sesuai

dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pembangunan harus dirancang dengan pendekatan partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan mendorong peningkatan kapasitas produksi dan distribusi, sementara pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang bagi keberlanjutan pembangunan. Indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), hanya memberikan gambaran sebagian. Indikator yang lebih menyeluruh adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Paul Streeten dan Burki (1978) mendefinisikan pembangunan sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia dan perluasan kesempatan yang tersedia bagi masyarakat. Pembangunan harus mengakomodasi keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan politik. Aspartin et al. (2019) dalam Wartoyo (2022) menegaskan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup dinamika struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan kelembagaan.

David Colander (2004) memandang pembangunan ekonomi sebagai proses yang mencakup komponen dinamis, praktik sosial, dan faktor politik. Pandangan ini menekankan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga proses sosial dan politik yang kompleks. Ginanjar Kartasasmita (1994) dalam Mulyani (2017) menyatakan bahwa pembangunan adalah upaya perubahan yang terstruktur dan terencana menuju kondisi yang lebih baik.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi syarat mutlak agar pembangunan berjalan efektif dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan partisipatif berarti masyarakat memiliki inisiatif dalam memulai dan menjalankan proses pembangunan. Keterlibatan aktif ini meningkatkan rasa memiliki, akuntabilitas, serta efektivitas implementasi kebijakan (Purnama, 2022). Partisipasi masyarakat mencerminkan prinsip dasar demokrasi, di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Aswandi & Roisah, 2019).

Partisipasi masyarakat juga mampu mempercepat akses publik terhadap sumber daya dan layanan sosial, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi kesenjangan sosial (Sukmana et al., 2015). Meski demikian, pelibatan masyarakat tidak selalu mudah dilakukan. Berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran, minimnya akses informasi, dan perbedaan kepentingan menjadi tantangan tersendiri.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya dalam bentuk edukasi, penguatan kapasitas, dan peningkatan dialog yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penelitian kepustakaan (library research), yakni objek kajiannya menggunakan data pustaka yang bersumber dari karya tulis atau bahan kepustakaan (literatur) dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pembangunan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa jurnal. Kemudian dari berbagai pendapat pakar tentang teori-teori studi pembangunan, secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendapat-pendapat tersebut ditelaah dan kemudian dianalisis satu sama lainnya. Model ini merujuk pada pendekatan penelitian deskriptif menurut Suliyanto (2018) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan

menggambarkan keadaan suatu objek tanpa melakukan pengujian hipotesis. Di mana variable yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini direduksi menjadi pendapat para pakar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan edukasi dari pemerintah. Contoh kasus di Desa Matayangan menunjukkan bahwa pembangunan strategis tidak berjalan dengan baik karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat memastikan bahwa hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada hakikatnya adalah pembangunan yang merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan Bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Pada proses pembangunan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional

Siagian (1983) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nationbuilding). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengertian pembangunan terkandung ide pokok yakni pembangunan merupakan suatu proses, usaha yang secara sadar dilakukan, serta dilaksanakan secara berencana, dan mengarah kepada modernitas. Dan juga proses pembangunan yang dilaksanakan tersebut ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa yang terus menerus dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan sekadar keterlibatan dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pemerintah. Kontribusi ini juga mencakup keterlibatan dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan. Dengan kata lain, kontribusi masyarakat merupakan sebuah proses yang menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan (Birokrasi et al., 2021). Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Namun, kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi global di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, kurangnya akses informasi dan partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan yang lemah, kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, kurangnya kesadaran akan pembangunan ekonomi, serta koordinasi dan kerjasama yang lemah.

Kontribusi aktif masyarakat dapat memunculkan komunikasi antar para pihak yang terlibat, sehingga terjalin kerjasama dan kolaborasi yang efektif. Komunikasi yang terjalin ini menjadi kunci dalam proses pelibatan masyarakat dalam pembangunan (Rachmawatie, S. J., & Pamujiasih, T (2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suparmoko

pada tahun 2002 beliau mengatakan bahwa taraf hidup suatu bangsa diukur dari pendapatan perkapita, tujuan pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Perencanaan pembangunan berkaitan dengan inisiatif perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi. Kegiatan perencanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri Indonesia sebagai negara berkembang. Mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan kualitas hidup yang lebih tinggi adalah tujuan dari kegiatan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi memiliki peran sentral dalam membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejauh ini, pembangunan ekonomi sering kali diukur melalui parameter-parameter seperti PDB, namun fokus pada kesejahteraan ekonomi memberikan perspektif yang lebih luas, mencakup kualitas hidup dan keadilan social (Fischer, t.t.; Roser, 2023).

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan masukan, memberikan tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan (Czapanskiy, & Manjoo 2008). Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik dan pembangunan, sehingga dapat lebih merespons kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mendorong terciptanya negara yang lebih demokratis dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat (Harris, Owen, & Gould 2012).

Menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan Adisasmita (2006) menyatakan, partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program Pembangunan.

Pentingnya partisipasi masyarakat Menurut Supriatna (2000) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mencapai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri

Bentuk Partisipasi Masyarakat Bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo (2007) yaitu:

1. Partisipasi pemikiran, adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang di ikutinya.
2. Partisipasi tenaga, adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk

pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

3. Partisipasi keterampilan, adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
4. Partisipasi barang, merupakan jenis partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk barang yang mencakup peralatan dan perlengkapan yang di butuhkan. Barang yang di maksudkan dalam hal ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh anggota yang secara sukarela digunakan untuk keperluan kegiatan atau acara dari kampung kreatif.
5. Partisipasi uang, adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi ini menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

Tahapan Partisipasi Masyarakat Menurut Ericson dalam Slamet (1993) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan yaitu partisipasi keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan rencana program pembangunan dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat mampu berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, kritik, melalui pertemuan yang di adakan.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan yaitu keterlibatan seseorang pada suatu pekerjaan atau proyek. Masyarakat memberikan tenaga, uang, ataupun material atau barang, serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
3. Partisipasi pada tahap pemeliharaan yaitu keterlibatan seseorang pada tahap pemeliharaan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga, uang pengoprasian, serta memelihara proyek yang telah di bangun.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Tjandraningsih (1996), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahterannya secara mandiri. Lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Prinsipnya masyarakat yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional (Suharto, 2005). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan atau sasaran, data, rencana, dan teknologi), aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), aspek keluaran atau output atau pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi (Adisasmita,

3. Tantangan Dalam Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Penelitian yang telah dilaksanakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pembangunan jalan usaha tani (JUT) dibidang fisik akan diuraikan berdasarkan beberapa tahapan. Pada tahapan pertama yaitu tahapan sosialisasi dan perencanaan yang akan diuraikan pada bab ini. Secara umum berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa dari awal program jalan usaha tani dilaksanakan, masyarakat

memiliki animo yang cukup rendah dalam berpartisipasi berkaitan dengan program Pembangunan jalan usaha tani. Dari tahapan sosialisasi masyarakat banyak yang tidak hadir untuk mengikuti acara sosialisasi program Pembangunan jalan usaha tani yang seharusnya membutuhkan keikutsertaan masyarakat yang cukup besar. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat dengan masyarakat dan proses penyampaian informasi hanya dilakukan dalam bentuk pemberitahuan secara langsung atau pribadi kepada setiap anggota masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk menyalurkan aspirasi mereka baik berupa masukan, usul, pendapat maupun gagasan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, diantaranya yaitu karena faktor pekerjaan dari masyarakat yang menurut mereka tidak bisa ditinggalkan, secara lugas masyarakat berfikir bahwa pekerjaan pribadi mereka lebih penting dari pada mengikuti program kegiatan program tersebut, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi adalah karena faktor kesehatan, ketidak tertarik terhadap program, dan bersamaan dengan kepentingan lain. Namun ketiga faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi. Dalam proses perencanaan pun masyarakat juga memiliki partisipasi yang rendah, karena apabila dilihat dari awal keikutsertaan masyarakat sudah tidak tertarik untuk berpartisipasi terhadap program tersebut, sehingga masyarakat tidak begitu mengetahui rencana apa yang akan dilakukan Ketika Pembangunan dilaksanakan apa saja yang direncanakan. Itu disebabkan karena tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan usulan program rendah karena program tersebut tidak diinformasikan intensif terhadap masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan terhadap program saja, akan tetapi ketidak ikut sertaan masyarakat terhadap perencanaan program tersebut juga dikarenakan pengurus jalan usaha tani tidak melibatkan seluruh masyarakat, hal ini dibuktikan dari responden yang menjadi sampel dalam penelitian banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak diundang sehingga hal ini memicu rendahnya animo masyarakat terhadap program jalan usaha tani tersebut.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi partisipasi masyarakat, seperti kurangnya kesadaran dan edukasi dari pemerintah, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Saran:

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan melalui sosialisasi dan pendidikan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, seperti pelatihan dan pendidikan. Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspartin, D., Djakfar, L., & Prasetyo, A. (2019). Multidimensional approach to community development: Socio-cultural dynamics and institutional roles. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 3(2), 45–59.
- Aswandi, A., & Roisah, K. (2019). Demokrasi partisipatif sebagai landasan pembangunan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 122–133.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking ‘participation’: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Luqmana, I. (2017). (Studi Kasus Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(April), 21–24.
- Marlita, V. S., & Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2), 159–171. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1200>
- Purnama, Y. (2022). Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 32–44.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Simangunsong, N. A., Wardani, D. A., Pramudya, A. R., Arrahman, M. I., & Wulandari, S. (2023). Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat . *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1289–1298. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2808>
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. OECD.
- Sukmana, R., Siregar, R. R., & Harahap, F. (2015). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 89–101.
- Umboh, S. F. I., Manginsela, E. P., & Moniaga, V. R. B. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jembatan Perkebunan Di Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosioekonomi*, 16(2), 269. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.2.2020.29493>
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democratic development. *Policy Studies*, 28(1), 1–15.
- Yulia, S., & Supriatna, E. (2024). *Educatus : Jurnal Pendidikan PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL YANG BERKELANJUTAN*. 2(2), 1–8